DUGAAN SUAP KEPALA DAERAH DAN PELUANG *IMPEACHMENT*

Hardianto Djanggih

Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (2) mengatur bahwa: Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dasar konstitusional ini menandakan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi. Artinya penyelenggaraan pemerintahan yang ideal dan sesuai dengan konsep negara hukum adalah pemerintah yang meletakkan hukum sebagai kerangka penyelenggaraan kekuasaan, serta memberikan peluang kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk turut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang ideal.

Salah satu alat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pemerintah daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan.

Setiap kepala daerah yang memimpin wilayah pemerintahan daerah dipilih melalui mekanisme pemilihan kepala daerah. Kepala daerah yang terpilih sebelum melaksanakan tugas pemerintahannya wajib untuk di ambil sumpah jabatan terlebih dahulu. Menurut Undang-undang Pemerintah Daerah Pasal 110 ayat 2, sumpah janji itu berbunyi "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah, berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa". sumpah janji jabatan bukan sesuatu yang ringan diucapkan. Sumpah janji jabatan sangat berat pertanggungjawabannya baik di sisi Allah maupun di hadapan hukum manusia. Mencermati isi sumpah, maka selayaknya kepala daerah harus mampu menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya. Artinya kepala daerah dituntut untuk dapat patuh terhadap undang-undang apapun termasuk undang-undang tindak pidana korupsi.

Kaitan dengan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e disebutkan bahwa: Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;. Salah satu pasal dalam 20 Tahun 2001 perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang suap, yaitu pasal 13 UU No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi: *Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)*. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: Setiap orang; Memberi hadiah atau janji; Kepada pegawai negeri; Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Praktik suap menyuap di Indonesia sudah menjadi kebiasaan yang lumrah. Khususnya dalam institusi pelayanan yang berkaitan dengan publik. Memberikan uang atau barang dalam rangka mempercepat proses yang berkaitan dengan birokrasi. Pemberian itu sebagai tanda agar dipercepat urusannya tanpa melalui mekanisme yang berlaku. Pembaca tentu pernah mendengar kata menyogok, ini sama artinya dengan suap menyuap. Hal itu merupakan perbuatan yang erat kaitannya dengan pejabat atau aparat, karena pihak yang menerima sogokan atau suap adalah pihak aparat atau pejabat, dengan harapan si penyuap dimudahkan atau mendapatkan janji kemudahan dalam tugas yang menjadi kewenangan aparat atau pejabat tersebut.

Dalam kaitan suap, pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten Banggai, penulis mengaitkan dengan salah satu postingan Sofyan Muhammad Jufri di media sosial (FB) yang menulis: "tgl 21 Nopember 2016 si herwin yatim menelpon saya untuk meminta uang sebanyak 30 juta katanya uang untuk temannya. Pada saat itu posisi saya di jakarta dan dia juga di jakarta. Setelah uang sdh saya siapkan maka si herwin mengajak saya untuk mengantar uang tsb ke hotel grand mercure jakarta barat. Ternyata yang ditemui adalah bapak kombes helmi dan uang tersebut dia mau kasih pak kombes helmi. Begitu pak herwin menyerahkan uang tersebut dan apa yang terjadi? Pak helmy sangat marah dan menolak uang tersebut. Kmai pun pulang dgn sangat malu".

Mencermati postingan dari Sofyan Muhammad Jufri, yang dimaksud Herwin adalah Bupati Banggai Periode 2016-2021, kemudian yang dimaksud Kombes Helmy adalah anggota Polisi yang berpangkat Kombes yang bertugas di Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah dengan jabatan saat itu Direktorat Resesre Kriminal Umum Polda Sulteng. Yang di maksud dengan 30 Juta adalah sejumlah uang yang akan diberikan oleh Herwin Yatim kepada Kombes Helmy untuk maksud tertentu.

Seperti kita ketahui bersama Herwin Yatim sebagai Bupati Banggai saat ini masih dalam proses hukum terkait Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2015. Yang mana kasus tersebut sampai saat ini masih bergulir, setelah Keplosian melakukan penerbitan Surat Penghentian Proses Penyidikan (SP3) Polda Suleng Nomor SP.Sidik/106.a1/IX/2016/ Ditreskrimum tertanggal 13 September 2016, SP3 tersebut dimentahkan oleh Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang dengan amar putusan: Menyatakan Penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon dengan Surat Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/106.a1/IX/2016/ Ditreskrimum tertanggal 13 September 2016 tidak sah menurut Hukum; Memerintahkan Para Termohon untuk melanjutkan penyidik atas laporan polisi nomor: LP/699/XII/2015/Sulteng/Res.Banggai tanggal 16 Desember 2015.

Kaitan dengan proses hukum ini, hubungan Herwin Yatim sebagai di duga pelaku tindak politik uang dengan Kombes Helmy sebagai penegak hukum. Artinya apa yang dilakukan Herwin Yatim adalah dalam suap-menyuap yang merupakan hal yang tercela adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan privilese atas dasar imbalan keuntungan finansial dan lain-lain, pelanggaran kepercayaan yang merupakan elemen demokrasi, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran sebagai pejabat negara. Sehingga dalam kasus ini tindakan Herwin telah mencerminkan suatu perbuatan yang telah melanggar undang-undang, baik UU Pemerintahan Daerah maupun UU Tindak Pidana Korupsi. Sehingga perbuatan Herwin Yatim dapat dilakukan suatu mekanisme pemberhentian sebagai kepala daerah sebagaimana diatur UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 78 (2) huruf e. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberhentikan karena melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan huruf f. melakukan perbuatan tercela.

Mengacu pada mekanisme Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan melalui proses politik pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah didasarkan pada usul pemberhentian berdasarkan pendapat DPRD. Pendapat atas bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah/wakil kepala daerah merupakan proses politik yang ada di tangan DPRD. Pendapat DPRD inilah yang bisa mengusulkan pemberhentian (impeachment) terhadap kepala daerah. Jika berdasarkan pendapat DPRD kemudian MA memutuskan bahwa mereka terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan atau tidak melaksanakan kewajiban, dan kemudian DPRD berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada presiden, maka presiden wajib memproses usul tersebut.

Artinya siapa pun yang menjadi pejabat publik, baik melalui mekanisme politik maupun penunjukan senantiasa memiliki tanggung jawab jabatan yang terikat dengan peraturan perundang-undangan yang mengikatnya. Sebab, kita semua harus menyadari bahwa tidak ada jabatan publik mana pun, khususnya jabatan kepala daerah yang dipilih melalui mekanisme

pemilihan langsung sekalipun, dapat kebal dari pemberhentian. Maka, adalah tanggung jawab mereka sebagai kepala daerah untuk selalu mematuhi segala aturan perundang-undangan agar terhindar dari obyek pemberhentian tersebut.

References

- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016), *Jurnal Dinamika Hukum*. 17 (2), 152-157.
- Thalib, H., Rahman, S., Mamulai, S., & Djanggih, H. (2017). Verification Through the Electronic Media (Teleconference) on the Court in Criminal Judicial System. *ADRI International Journal Of Law and Social Science*, 1 (1), 1-9.
- Djanggih, H. & Saefudin Y. (2017). Pertimbangan Hakim pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 17 (3), 413-423.
- Djanggih, H. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cybercrime di Bidang Kesusilaan. *Jurnal Media Hukum*, 1 (2), 57-77.
- Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 11 (3), 337-347.
- Djanggih, H., & Salle. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, *Pandecta; Research Law Journal*, 12 (2), 165-172.
- Mamulai, M., Djanggih, H & Wahab, M. (2017). Strength of Evidence of Electronic Media (Teleconference) In The Criminal Justice System, *VRIJSPRAAK; International Law Journal*, 1 (1), 1-20.
- Thalib, H., Ramadhan, A., & Djanggih, H. (2017). The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia, *Rechtsidee*, 4 (1).